

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang telah secara resmi diakui berdasarkan Konvensi UNCLOS 1982, dengan jumlah pulau mencapai 17.504, lebih dari dua pertiganya merupakan wilayah perairan atau laut. Sebagai negara kepulauan terbesar dan dengan panjang garis pantai yang menempatkannya pada peringkat keempat terpanjang di dunia, Indonesia memiliki sumber daya laut yang sangat kaya dan melimpah (Listiyono dkk., 2019). Kekayaan laut ini telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian, salah satu pemanfaatan sumber daya laut yang banyak dilakukan oleh masyarakat ialah budidaya tambak.

Tambak adalah salah satu jenis habitat yang dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan budidaya hasil laut yang berlokasi di kawasan pesisir (Mulyono & Ritonga, 2019). Tambak di Indonesia biasanya menghasilkan produk perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, sama halnya dengan tambak yang ada di Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten yang ada di pesisir utara Jawa Barat. Persebaran tambak di Kabupaten Indramayu umumnya terdapat di wilayah pesisir, daerah yang berbatasan langsung dengan laut (Fitriyani & Martunis, 2021).

Di tengah pertumbuhan penduduk yang terus berlanjut dan perkembangan urbanisasi, terjadi perubahan penggunaan dari yang sebelumnya merupakan lahan tambak beralihfungsi menjadi perumahan. Di Kabupaten Indramayu, perubahan penggunaan lahan dari lahan tambak menjadi lahan perumahan telah menjadi tren yang berkembang. Berdasarkan data di lapangan, lahan tambak yang paling banyak beralih fungsi menjadi perumahan ialah di Kecamatan Indramayu. Fenomena ini terjadi seiring dengan adanya peningkatan permintaan perumahan, pertumbuhan ekonomi, serta implikasi sosial dan lingkungan.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, pada tahun 2015 jumlah penduduk Kecamatan Indramayu mencapai 111.009 jiwa. Pada tahun 2015 lahan tambak masih banyak terlihat di Desa Tambak, yang mana luas

lahan tambak mencapai 1393,904 hektar. Jumlah produksi budidaya ikan mencapai 24.210.00 ton. Kecamatan Indramayu menjadi kecamatan yang pertumbuhan penduduknya paling tinggi di Kabupaten Indramayu, pada tahun 2015 jumlah penduduk Kecamatan Indramayu berjumlah 111.009 jiwa, kemudian pada tahun 2022 jumlah penduduk Kecamatan Indramayu mencapai 124.027 jiwa. Jarak 7 tahun ini menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana dinamika perubahan lahan tambak yang ada di Kecamatan Indramayu.

Lokasi pada Kecamatan Indramayu terbilang cukup strategis karena berada di wilayah pusat kota serta berdekatan dengan infrastruktur lain seperti sekolah, tempat wisata, dan alun-alun. Kecamatan Indramayu berada pada pusat perkotaan dengan jumlah penduduk paling tinggi. Oleh karena itu banyak area lahan tambak yang beralih fungsi menjadi area perumahan karena kebutuhan dasar dari meningkatnya jumlah penduduk di kecamatan tersebut. Selain karean meningkatnya jumlah penduduk, banyaknya lahan tambak yang terendam banjir juga turut menjadi alasan mengapa terjadi alih fungsi lahan.

Pada tahun 2021, Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) melakukan pendataan luas lahan tambak yang terendam banjir di Kabupaten Indramayu mencapai 4.001,3 hektar. Petambak mengalami kerugian besar karena jutaan ikan dan udang kabur dari lahan tambak. Peningkatan jumlah penduduk yang dibarengi dengan menurunnya hasil budidaya tambak karena pengaruh perubahan iklim membuat petambak memilih untuk menjual lahannya kepada developer (pengembang perumahan), sementara itu ada juga petambak yang membeli lahan tambak baru di wilayah lain yang memiliki produktivitas cukup baik untuk menggantikan lahan tambak yang telah dijual kepada pihak developer.

Perubahan penggunaan lahan ini tentunya tidak terlepas dari kebijakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR merupakan instrumen penting dalam perencanaan perkotaan yang mengatur tata ruang wilayah secara lebih rinci. Dokumen ini merinci bagaimana penggunaan lahan, zonasi, serta prinsip-prinsip pengembangan perkotaan di suatu daerah dengan merujuk pada Rencana Detail Tata Ruang (RTRW) (Feryanto Kurniawan dkk., 2021). Secara

keseluruhan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dapat diartikan sebagai produk dari tahap perencanaan spasial suatu wilayah setelah melalui proses perencanaan, pemanfaatan, serta pengawasan dan regulasi penggunaan ruang yang ada (Kusumaedi & Bagiastra, 2016). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kesesuaian perubahan penggunaan lahan tambak menjadi perumahan dengan RDTR yang telah ditetapkan. Tata ruang dan aturan zonasi dijadikan sebagai acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

Analisis RDTR menjadi penting untuk memahami visi dan misi pengembangan wilayah, serta merinci ketentuan yang mengatur tata ruang di kecamatan tersebut. Informasi ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap alokasi lahan untuk berbagai kepentingan, termasuk lahan perumahan dan tambak. RDTR menetapkan zona-zona dan fungsi-fungsi lahan tertentu. Kesesuaian lahan harus memperhatikan apakah perubahan penggunaan lahan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan. Dengan menyesuaikan penggunaan lahan dengan RDTR, sumber daya dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan perkotaan, pertanian, dan lingkungan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penyusunan rencana tata ruang dilakukan harus mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi, yang disusun secara bertahap oleh karena itu rencana tata ruang ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing. Peraturan Detail Tata Ruang (RDTR) berlaku selama periode 20 tahun dan akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun berdasarkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang. Pedoman ini menjadi acuan dalam merumuskan panduan fungsi kawasan guna menjamin bahwa pemanfaatan lahan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Hoirnisa dkk., 2019). Jika penggunaan lahan tidak sejalan dengan rencana awal yang telah ditetapkan maka hal ini dapat menyebabkan masalah dalam pengaturan ruang. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan yang akan datang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (Panjaitan Adri, Sudarsono Bambang, 2019).

Kesesuaian lahan juga berkaitan dengan kondisi lingkungan, seperti topografi, tanah, dan keberlanjutan ekosistem. Perubahan penggunaan lahan dari tambak menjadi perumahan memiliki dampak yang kompleks, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kesesuaian perubahan ini menjadi krusial dalam rangka memastikan bahwa pengembangan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan dan berwawasan masa depan. Peningkatan jumlah unit perumahan dari waktu ke waktu serta penurunan luas lahan tambak di daerah yang menjadi fokus penelitian memungkinkan untuk diidentifikasi terkait alih fungsi penggunaan lahan dari tambak menjadi kawasan perumahan (Asriani dkk., 2021).

Penelitian ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan penginderaan jauh, dengan kemampuan menghimpun, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menampilkan kembali kondisi-kondisi alam, Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat mewakili berbagai elemen yang terdapat pada permukaan bumi (Abd. Malik dkk., 2018). Kemudian teknologi penginderaan jauh telah semakin berkembang, diantaranya jumlah produksi citra yang tersedia dengan resolusi yang lebih tinggi secara spektral, spasial, dan temporal telah meningkat sebagai hasil dari kemajuan besar dalam teknologi penginderaan jauh (Parsa dkk., 2020). Penelitian ini menggunakan metode skoring atau pembobotan dalam SIG (Sistem Informasi Geografis). Metode ini digunakan untuk memberikan nilai atau bobot pada berbagai faktor atau variabel dalam analisis geografis. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang suatu area geografis atau fenomena tertentu yang terjadi di dalamnya (Akbar dkk., 2020).

Pada penelitian Adri Panjaitan dkk., 2019 teknologi SIG dan penginderaan jauh dipakai untuk Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap RTRW di Kabupaten Cianjur. Hasilnya menunjukkan pada tahun 2011, kesesuaian penggunaan lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RDTR) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 mencapai 18.886,975 hektar atau 47,072% dari total luas wilayah kajian, namun pada tahun 2017 kesesuaian ini

meningkat menjadi 19.183,538 hektar atau 47,81 % dari total luas wilayah kajian. Kemudian pada penelitian karya Merpati Dewo Kusumaningrat dkk tahun 2017, metode SIG dan penginderaan jauh juga dipakai untuk Analisis Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Terhadap RTRW tahun 2009 dan 2017. Hasilnya menunjukkan kesesuaian penggunaan lahan Kabupaten Boyolali meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2009 mencapai 92,25%, sementara pada tahun 2012 meningkat hingga 92,83%, dan tahun 2017 meningkat hingga mencapai 93,43%. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan yang konsisten dalam mencapai kesesuaian penggunaan lahan dengan kebijakan pola rencana tata ruang yang ditetapkan.

Transformasi lahan dari bekas tambak menjadi kawasan perumahan sangat penting dalam pembangunan perkotaan. Kecamatan Indramayu, sebagai salah satu daerah yang berkembang pesat tengah menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan kebijakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan potensi pemanfaatan lahan bekas tambak untuk perumahan. Kesesuaian lahan dengan RDTR Kecamatan Indramayu adalah langkah penting dalam memastikan pembangunan yang terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan memahami pentingnya kesesuaian lahan, dapat diupayakan untuk mencapai pembangunan yang berdaya guna dan berkelanjutan di wilayah tersebut. Lahan tambak yang ada di Kecamatan Indramayu semakin berkurang dari tahun ke tahun, penelitian ini menggunakan tahun 2015 sebagai perbandingan untuk melihat sejauh mana lahan tambak beralih fungsi menjadi perumahan di tahun 2022, dengan jarak 7 tahun tersebut maka akan terlihat perbedaan penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Indramayu.

Melalui adanya penelitian ‘Evaluasi Kesesuaian Lahan Perumahan Bekas Tambak Dengan Kebijakan RDTR Perkotaan Indramayu Menggunakan Sistem Informasi Geografi’ ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana fenomena perubahan penggunaan lahan tambak menjadi perumahan terjadi dan bagaimana kesesuaiannya terhadap kebijakan tata ruang perkotaan di Kecamatan Indramayu, serta apa saja faktor yang

menyebabkan hal ini terjadi. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang berkelanjutan dalam pengembangan kawasan perkotaan serta pengelolaan lahan di masa yang akan datang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sebaran dan persentase lahan tambak yang terkonversi menjadi perumahan dari tahun 2015 & 2022 di Kecamatan Indramayu?
2. Bagaimana kesesuaian lahan perumahan bekas tambak dengan kebijakan RDTR Perkotaan Indramayu?
3. Apa saja faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan tambak menjadi perumahan di Kecamatan Indramayu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penguraian masalah yang telah terperinci sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Mengetahui persentase dan mengetahui sebaran lahan tambak yang terkonversi menjadi perumahan dari tahun 2015 & 2022 di Kecamatan Indramayu
2. Mengevaluasi kesesuaian lahan perumahan bekas tambak dengan kebijakan RDTR Perkotaan Indramayu menggunakan metode Sistem Informasi Geografis (SIG)
3. Menganalisis faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan tambak menjadi perumahan di Kecamatan Indramayu.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Menambah wawasan terkait bagaimana fenomena perubahan lahan tambak menjadi perumahan terjadi.

2. Menambah wawasan terkait pemahaman kesesuaian penggunaan lahan dengan kebijakan RDTR
 3. Mengetahui faktor apa saja penyebab terjadinya alih fungsi lahan tambak menjadi perumahan.
- b. Manfaat Praktis
1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan terkait fenomena perubahan fungsi lahan tambak menjadi perumahan terjadi serta mengetahui pemanfaatan metode penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis dalam permasalahan alih fungsi lahan tambak.
 2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi informasi terkait bagaimana kesesuaian lahan perumahan bekas tambak ditinjau dari kebijakan RDTR serta faktor apa saja yang menyebabkan lahan tambak tersebut beralihfungsi menjadi lahan perumahan
 3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam membuat kebijakan atau sebagai bahan pertimbangan terkait perizinan pembangunan perumahan di lahan tambak agar sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu serta selaras dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Indramayu.

1.5. Definisi Operasional

Definisi operasional mengacu pada batasan yang diberikan pada setiap variable penelitian, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan penafsiran atas istilah-istilah yang digunakan. Definisi operasional menjadi pedoman yang jelas dalam menafsirkan setiap variabel agar memiliki pemahaman yang seragam dan terhindar dari penafsiran yang bervariasi.

1. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah segala bentuk usaha manusia dalam rangka memanfaatkan lingkungan alamnya dengan mengikuti perkembangan kehidupan dan budayanya yang secara umum merupakan suatu proses dari adanya interaksi, keseimbangan, serta keadaan dinamis antara aktifitas-aktifitas penduduk atas lahan dan keterbatasan dalam

lingkungannya (Juhadi, 2019). Dalam penelitian ini penggunaan lahan yang menjadi fokus penelitian ialah lahan tambak dan lahan perumahan bekas tambak. Dalam melihat alih fungsi lahan tambak menjadi perumahan dibutuhkan proses digitasi serta *overlay* menggunakan *software* ArcGIS. Setelah proses pengolahan selesai dapat diketahui sebaran luas dan persentase lahan tambak yang terkonversi menjadi perumahan dan non perumahan. Perhitungan persentase perubahan lahan tambak ini dapat diketahui dengan rumus:

$$\text{Persentase Konversi} = \left(\frac{\text{Luas Perumahan} - \text{Luas Tambak (2015)}}{\text{Luas Tambak (2015)}} \right) \times 100$$

2. Kesesuaian Lahan Perumahan

Konsep kesesuaian lahan digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu area atau lahan sesuai untuk keperluan tertentu seperti pertanian, perumahan, industri, konservasi alam, atau penggunaan lainnya. Evaluasi kesesuaian lahan melibatkan berbagai parameter dan juga dampak lingkungan, yang secara kolektif memengaruhi kapabilitas lahan untuk mendukung tujuan yang diinginkan dalam pemanfaatannya. (Ritung dkk, 2011). Dalam penelitian ini kesesuaian lahan digunakan untuk mengevaluasi pembangunan lahan perumahan bekas tambak terhadap kebijakan RDTR Perkotaan Indramayu.

Dalam menentukan kesesuaian lahan perumahan dibutuhkan parameter-parameter berupa kemiringan lereng, penggunaan lahan, jenis tanah, curah hujan, dan jarak terhadap jalan utama. Seluruh parameter tersebut dilakukan skoring dan *overlay* hingga menghasilkan peta kesesuaian lahan perumahan. Lahan perumahan dikatakan sangat sesuai apabila memiliki kemiringan lereng < 8%, memiliki jarak < 100 meter terhadap jalan utama, memiliki curah hujan dengan intensitas rendah hingga sedang, serta memiliki jenis tanah latosol. Kemudian peta kesesuaian lahan tersebut dilakukan *overlay* kembali dengan peta sebaran lahan tambak dan perumahan bekas tambak serta peta rencana pola ruang RDTR Perkotaan Indramayu untuk melihat kesesuaian lahan perumahan

bekas tambak dengan kebijakan RDTR Perkotaan Indramayu sesuai dengan fokus penelitian kali ini.

Tingkat kesesuaian lahan perumahan terbag menjadi empat kelas, yaitu sangat sesuai, sesuai, cukup sesuai, dan tidak sesuai. RDTR menjadi acuan untuk mengatur aktivitas penggunaan lahan yang lebih spesifik, serta untuk penerbitan izin penggunaan lahan dan sebagai sumber informasi dalam perencanaan pembangunan dan penggunaan lahan (Feryanto Kurniawan dkk., 2021).

3. Faktor Alih Fungsi Lahan Tambak

Alih fungsi lahan, atau yang umumnya disebut sebagai konversi lahan, mengacu pada perubahan fungsi sebagian atau seluruh area lahan yang pada awalnya berfungsi untuk keperluan seperti produksi bahan pangan, tambak, atau persawahan, menjadi kawasan yang mengalami transformasi sesuai dengan kesepakatan atau kebijakan tertentu. (Noviyanti & Sutrisno, 2021). Faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan tambak ini dapat disebabkan oleh faktor internal dari pemilik lahan tambaknya sendiri maupun faktor eksternal dari pihak pengembang perumahan ataupun pemerintah.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, diketahui jika faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan tambak menjadi perumahan diantaranya ialah menurunnya produktivitas tambak, meningkatnya jumlah penduduk, serta faktor aksesibilitas dan infrastruktur yang menunjang adanya alih fungsi lahan tambak menjadi perumahan di Kecamatan Indramayu

1.6. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 menunjukkan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam menyusun penelitian ini. Keterbaruan pada penelitian yang dilakukan ialah melakukan evaluasi lahan perumahan bekas tambak terhadap kebijakan RDTR Perkotaan Indramayu Kabupaten Indramayu.

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun, dan Lembaga	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1	Siti Hoirnisa, Iksal Yanuarsyah, Sahid Hudjimartsu. 2019. Universitas Ibn Khaldun Bogor.	Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap RTRW Kota Bogor	<ul style="list-style-type: none">• Mengetahui penggunaan lahan hasil interpretasi citra foto udara• Mengetahui tingkat kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW yang telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan pemanfaatan ruang.	Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah Digitasi untuk mengidentifikasi penggunaan lahan dan metode <i>Overlay</i> untuk mengetahui kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW.	Analisis konsistensi penggunaan lahan terhadap RTRW dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW yang telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan pemanfaatan ruang. Analisis ini dilakukan dengan cara mengoverlay peta penggunaan lahan hasil digitasi dengan peta RTRW Kota Bogor. Hasil dari overlay tersebut adalah sebaran konsistensi pemanfaatan ruang. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah hasil analisis diketahui bahwa telah terjadi ketidaksesuaian penggunaan lahan saat ini dengan RTRW Kota Bogor.
2	Anindyakusuma Hapsari, Su Ritohardoyo. 2015.	Kesesuaian Perubahan Penggunaan	<ul style="list-style-type: none">• Mengkaji perubahan penggunaan lahan di	Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan	Hasil penelitian menunjukkan perubahan penggunaan lahan yang terjadi seluas 149,54 Ha atau 5,6% selama kurun waktu lima tahun. Klasifikasi kesesuaian perubahan penggunaan lahan

	Universitas Gadjah Mada	Lahan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Wilayah Peri-Urban Kasus: Kecamatan Godean tahun 2009-2014	Kecamatan Godean tahun 2009-2014 <ul style="list-style-type: none"> • Menilai kesesuaian perubahan penggunaan lahan yang terjadi dengan RDTR Kecamatan Godean tahun 2009-2029 • Mengkaji kecenderungan ketidaksesuaian pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi kawasan dan faktor-faktor geografis. • Menyusun rekomendasi arahan kebijakan untuk mengatasi ketidaksesuaian antara penggunaan lahan yang ada dengan RDTR. 	metode survey dengan pendekatan kuantitatif.	dengan RDTR diketahui sebagian besar sesuai yakni 87,21%, 11,18% belum sesuai, dan 5,28% tidak sesuai. Ketidaksesuaian yang terjadi berada di kawasan konservasi dengan luas 4,02 Ha. Sisanya berada kawasan pengembangan seluas 3,83 Ha. Selain itu, ketidaksesuaian yang ada juga dipengaruhi oleh faktor geografis seperti jenis anah, lokasi, ketersediaan air, dan juga kemiringan lereng
3	Meparpati Dewo Kusumaningrat, Sawitri Subiyanto, Bambang Darmo Yuwono. 2017.	Analisis Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui seberapa besar perubahan penggunaan lahan dan di Kabupaten 	Penelitian ini dilakukan dengan cara membuat peta perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan	Pertumbuhan Kabupaten Boyolali atau perubahan penggunaan lahan Kabupaten Boyolali selama 8 tahun terjadi paling tinggi di Kecamatan Sawit dengan presentase kenaikan penggunaan permukiman sebesar 5,57%, sedangkan untuk perubahan penggunaan lahan paling rendah terdapat di Kecamatan Selo

Qistin Taniyah Nur, 2024

EVALUASI KESESUAIAN LAHAN PERUMAHAN BEKAS TAMBAK DENGAN KEBIJAKAN RDTR PERKOTAAN INDRAMAYU MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	Univesitas Diponegoro.	Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009 dan 2017.	<p>Boyolali dalam kurun waktu 2009-2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui seberapa besar perubahan pemanfaatan lahan dan di Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu 2009-2017 • Mengetahui kesesuaian penggunaan lahan Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu tahun 2009-2017. 	<p>tahun 2009-2017 yang bertujuan untuk melihat perubahan dan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Boyolali serta mebandingkannya dengan peta pola ruangnya. Penelitian ini menggunakan metode digitasi dan matrik konfusi.</p>	<p>dengan presentase kenaikan penggunaan permukiman sebesar 0,30%. Perubahan penggunaan lahan paling luas terdapat di Kecamatan Simo dengan kenaikan penggunaan lahan permukiman sebesar 248,24 hektar, sementara perubahan penggunaan lahan paling kecil berada di Kecamatan Selo dengan kenaikan penggunaan lahan permukiman sebesar 12,10 hektar. Perubahan ini menandakan bahwa pembangunan di Kabupaten Boyolali tidak hanya berpusat di ibukota kabupaten saja tetapi merata ke setiap kecamatan.</p> <p>Perubahan pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Boyolali selama 8 tahun terjadi peningkatan pada klasifikasi kegiatan sosial dengan sosial mengalami peningkatan sebesar 91,41 hektar dan pemanfaatan tempat tinggal naik 1363,16 hektar, sementara kelas tidak ada pemanfaatan mengalami penurunan sebesar 210,61 hektar, kegiatan ekonomi juga mengalami penurunan sebesar 1275,9 hektar, hal ini disebabkan karena kebutuhan akan tempat tinggal dan sarana dan prasarana umum di Kabupaten Boyolali mulai meningkat</p> <p>Hasil dari kesesuaian penggunaan lahan di Kabupaten Boyolali tahun 2009 sebesar 92,25%, tahun 2012 sebesar 92,83% dan tahun 2017 sebesar 93,43% dari luas kabupaten penggunaan lahannya. Data tersebut menunjukkan progres kesesuaian penggunaan lahan Kabupaten Boyolali selalu naik dan mendekati rencana pola ruangnya.</p>
4	Trigus Eko & Sri Rahayu. 2012. Universitas Diponegoro.	Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaiannya terhadap RDTR	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Mlati sebagai wilayah 	<p>Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran dengan metode</p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa 10,32% guna lahan di Mlati berubah sepanjang kurun waktu tersebut, yang mengakibatkan hilangnya 290,67 acre area pertanian dengan 13,12% diantaranya berubah menjadi permukiman. Namun demikian, 65,9% dari guna lahan disana masih sesuai dengan dokumen perencanaan. Wilayah ini</p>

Qistin Taniyah Nur, 2024

EVALUASI KESESUAIAN LAHAN PERUMAHAN BEKAS TAMBAK DENGAN KEBIJAKAN RDTR PERKOTAAN INDRAMAYU MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

		di Wilayah Peri-Urban Studi Kasus: Kecamatan Mlati	<p>peri-urban Kota Yogyakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis kesesuaian terhadap rencana pemanfaatan ruang dalam RDTR APY Kecamatan Mlati • Menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan rencana pemanfaatan ruang. 	<p>sekuensial/bertahap. Metode yang dilakukan adalah menggabungkan atau memperluas dari metode kuantitatif pada tahap awal dengan penemuan-penemuan dari metode deskriptif kualitatif pada tahap berikutnya (Creswell, 2010).</p>	<p>kekurangan aspek hukum dalam penerapan kebijakan guna lahannya karena dokumen perencanaan belum disahkan. Aspek kelembagaan menunjukkan konsistensi dan ketersediaan sumber daya, tetapi ada kelemahan dalam implementasi terkait kontrol dan penegakan hukum. Investasi, kebijakan pajak dan perubahan guna lahan ilegal menjadi ancaman bagi implementasi kebijakan.</p>
5.	Adri Panjaitan, Bambang Sudarsono. Nurhadi Bashit. 2019. Universitas Diponegoro	Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Cianjur Menggunakan Sistem Informasi Geografis	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui persebaran penggunaan lahan sesuai dengan identifikasi citra satelit IKONOS tahun 2011 dan SPOT 7 tahun 2017 dengan digitasi <i>on-screen</i> • Menganalisis kesesuaian dan perubahan penggunaan lahan 	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode digitasi <i>on-screen</i> pada citra SPOT 7 tahun 2017 dan citra IKONOS tahun 2011 serta metode <i>overlay</i> untuk memperoleh informasi mengenai kesesuaian antara hasil digitasi pada citra dengan Rencana Tata Ruang Wilayah pada setiap atribut yang sama</p>	<p>Penggunaan lahan pada wilayah penelitian dengan total luas 40.123,4 ha. Perubahan penggunaan lahan tahun 2011 hingga 2017 didapatkan hasil berupa peningkatan dan penurunan luas penggunaan lahan. Luas lahan yang bertambah yaitu hutan konservasi sebesar 14,332 ha (0,04%), hutan produksi sebesar 840,813 ha (2,1%), permukiman pedesaan sebesar 605,858 ha (1,51%), permukiman perkotaan sebesar 172,969 ha (0,43%) dan industri sebesar 7,592 ha (0,02%), sedangkan luas lahan yang berkurang yaitu perairan sebesar 4,376 ha (0,01%), perkebunan/tanaman tahunan sebesar 14,582 ha (0,04%), pertanian lahan kering sebesar 1.394,808 ha (3,38%), pertanian lahan basah sebesar 200,4 ha (0,50%) dan sempadan sungai dan danau sebesar 27,399 ha (0,07%).</p>

Qistin Taniyah Nur, 2024

EVALUASI KESESUAIAN LAHAN PERUMAHAN BEKAS TAMBAK DENGAN KEBIJAKAN RDTR PERKOTAAN INDRAMAYU MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

			tahun 2011 dan 2017 terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031		Kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 pada tahun 2011 sebesar 18.886,975 ha atau 47,072 % sedangkan pada tahun 2017 sebesar 19.183,538 ha atau 47,81 % dari total luas wilayah penelitian, sehingga kesesuaian Penggunaan lahan wilayah penelitian mengalami peningkatan dalam rentang waktu 6 tahun sebesar 296,563 ha atau 0,739 %.
6	Sahrumansyah. 2021. Universitas Muhammadiyah Mataram.	Analisis Perubahan dan Kesesuaian Penggunaan Lahan di Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Ditinjau dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan berdasarkan data penggunaan lahan tahun 2014 dan data penggunaan lahan tahun 2020 di Kecamatan Rasanae Barat • Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan lahan di Kecamatan Rasanae Barat terhadap (PERDA) Nomor 4 Tentang “Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima” 	Cara pengumpulan data dari penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi/pengamatan langsung di lapangan, dokumentasi, wawancara dan pengumpulan data sekunder di instansi tertentu, data yang di butuhkan seperti citra satelit, Peta Pemanfaatan Ruang dan Peta Rencana Pola Ruang Kecamatan Rasanae Barat. Metode analisis yang di lakukandalama penelitian ini yaitu menggunakan analisis spacial dengan teknik overlay	Hasil dari penelitian ini yaitu adatanya perubahan penggunaan lahan yang terjadi akibat dari pelaksanaan reklamasi pantai dan terdapat penggunaan lahan yang terindikasi tidak sesuai terhadap peraturan daerah (PERDA) Nomor 4 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2012.

Qistin Taniyah Nur, 2024

EVALUASI KESESUAIAN LAHAN PERUMAHAN BEKAS TAMBAK DENGAN KEBIJAKAN RDTR PERKOTAAN INDRAMAYU MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

7	Rena Is Kiswati. 2021. Universitas Muhammadiyah Surakarta.	Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Blora Tahun 2012-2018	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Blora tahun 2012 – 2018 • Menganalisis kesesuaian penggunaan lahan tahun 2018 terhadap RTRW tahun 2011 – 2031 di Kabupaten Blora • Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Blora 	Pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan bantuan GIS dengan metode spasial (<i>overlay</i>) kemudian, dilakukan analisis data sekunder untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan tahun 2012 - 2018 Kabupaten Blora dan mengetahui tingkat kesesuaian penggunaan lahan tahun 2018 dengan RTRW di 2011 - 2031	<p>Penggunaan lahan di Kabupaten Blora dari tahun 2012 hingga 2018, yaitu seluas 182.058,80 Ha. Selama kurun waktu tujuh tahun Kabupaten Blora mengalami perubahan penggunaan lahan seluas 16.111,17 Ha dan kelebihanannya 165.947,63 Ha merupakan lahan yang tidak mengalami perubahan selama kurun waktu tersebut. Wilayah yang paling banyak mengalami perubahan penggunaan lahan pada tahun 2012 – 2018 terletak di Kecamatan Jepon seluas 1.127,92 Ha, sedangkan wilayah yang paling sedikit mengalami perubahan penggunaan lahan terletak di Kecamatan Japah seluas 623,34 Ha.</p> <p>Kesesuaian penggunaan lahan pada tahun 2018 dengan RTRW di dominasi menurut kelas yang ditunjukkan dengan luasan 147.090 Ha atau 80,97%, maka pada saat itu di posisi kedua wilayah yang tidak layak adalah 25.862,02 Ha atau 14,21% dan wilayah yang tidak sesuai adalah 9.106,77 Ha atau 5% dari luas ruang wilayah administrasi Kabupaten Blora tahun 2018. Kesesuaian RTRW untuk penggunaan lahan di Kabupaten Blora berada pada kategori sesuai, yaitu memiliki luasan terkecil dari penggunaan lahan lainnya dengan luas 2,56 Ha atau 7%. Kemudian kategori belum sesuai dengan pemanfaatan lahan kawasan hutan lindung dengan luas 2.149,6 Ha atau 2,37%. Sedangkan kategori tidak sesuai yaitu pemanfaatan lahan untuk perdagangan yang memiliki wilayah terluas dengan luasan sebesar 2.813.1 Ha.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2018 terjadi perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Blora seluas 16.111,17 Ha, sedangkan penggunaan lahan yang diklasifikasikan sesuai dalam RTRW adalah 147.090 Ha atau 80,79 % dari luas keseluruhan di Kabupaten Blora. Untuk sementara kesesuaian lahan yang tidak sesuai adalah 25.862,02 Ha atau 14,21% dan ada</p>
---	--	--	--	--	---

					9.106,77 Ha atau 5% penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Blora Tahun 2011-2031.
8	Chairil Akmal, Sugianto, Manfarizah. 2016. Universitas Syiah Kuala.	Analisis Perubahan Lahan Sawah dan Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Tata Ruang di Kecamatan Krueng Barona jaya Kabupaten Aceh Besar	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui perubahan lahan sawah dan pemanfaatan lahan berdasarkan tata ruang di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. • Mengetahui kesesuaian penggunaan lahan sawah eksisting dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar • Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan lahan sawah menjadi lahan non pertanian berdasarkan tata ruang di Kecamatan 	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survai deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, mencatat, melakukan analisis terhadap berbagai data dan informasi yang sudah didapatkan dari survai lapangan (<i>ground survai</i>) didasarkan pada analisis data primer citra satelit Google Earth serta melakukan pengamatan kondisi fisik, titik koordinat dengan bantuan alat GPS serta analisis di laboratorium	Laju alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Krueng Barona Jaya Tahun 2009-2014 adalah sebesar 112,23 Ha atau sebesar 16,11% beralih penggunaannya menjadi pemukiman dan pertanian lahan kering. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW 2013-2032 seluas 1,14 Ha yaitu sebesar 0,16%. Secara umum faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Krueng Barona Jaya yaitu kebutuhan hidup, permintaan terhadap lahan tinggi, kondisi lahan, dorongan untuk konversi dan jarak ke pusat kota dan kecamatan yang dekat.

			Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.		
9	Reny Savitri & Ester Fransiska	Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur	Untuk menganalisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana pola ruang dalam Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta Kelurahan Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur	Analisis penggunaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang didasarkan oleh analisis kebijakan tata ruang dan analisis penggunaan lahan secara keruangan (spasial) dengan teknik overlay menggunakan GIS dan analisis secara deskriptif mengenai faktor penyebab ketidaksesuaian penggunaan lahan melalui tinjauan pustaka dan hasil dari wawancara dengan narasumber.	Hasil dari penelitian diantaranya penggunaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang didominasi oleh hunian seluas 359.16 Ha (65.52%), hasil analisis dengan matriks ITBX menghasilkan pemanfaatan ruang di Kelurahan Pulo Gebang 39.61% diizinkan, 27.80% terbatas, 13.13% bersyarat, dan 19.46% tidak diizinkan atau dilarang dan apabila diklasifikasikan dalam kategori sesuai (diizinkan, terbatas, bersyarat) menghasilkan 80.54% penggunaan lahan sudah sesuai dengan rencana pola ruang dan dalam kategori tidak sesuai (tidak diizinkan atau dilarang) menghasilkan 19.46% penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang, dan faktor penyebab ketidaksesuaian lahan diantaranya faktor hak atas tanah, perizinan, dan faktor masyarakat sehingga perlu direkomendasikan untuk meninjau kembali RDTR dan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang yaitu penetapan regulasi yang tepat.
10	Sodikin, Mujio, Santun R. P. Sitorus.2022. Universitas Riau.	Analisis Keselarasan Penggunaan Lahan dengan Pola Ruang RTRW di Kabupaten Indramayu	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Mengetahui keselarasan 	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik <i>overlay</i> dengan bantuan software GIS, yaitu meng-overlay-kan peta penggunaan lahan	Penggunaan lahan di Kabupaten Indramayu terdiri dari 15 jenis yang terdiri dari sawah dengan padi terus menerus seluas 131.631, Bangunan pemukiman desa dan kota seluas 21.337 ha, Tambak ikan/udang seluas 16.892 ha, Hutan Jati seluas 12.489 ha, Jaringan jalan aspal/beton 11.147 ha, Perkebunan tanaman semusim seluas 9.461 ha, Mangrove seluas 2.216 ha, Sungai seluas 1.110 ha, Semak belukar seluas 1100 ha, Bangunan industri seluas 946 ha, waduk irigasi seluas 565 ha, tambak garam seluas

Qistin Taniyah Nur, 2024

**EVALUASI KESESUAIAN LAHAN PERUMAHAN BEKAS TAMBAK DENGAN KEBIJAKAN RDTR PERKOTAAN INDRAMAYU MENGGUNAKAN SISTEM
INFORMASI GEOGRAFIS**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

		Provinsi Jawa Barat	penggunaan lahan dengan pola ruang RTRW di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2011-2031	eksisting tahun 2021 dengan peta pola ruang Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031. Selanjutnya hasil <i>overlay</i> dilakukan <i>query</i> berdasarkan matrik logika keselarasan jenis penggunaan lahan dengan pola ruang yang menghasilkan peta keselarasan pemanfaatan ruang Kabupaten Indramayu.	326 ha, lahan terbuka seluas 47 ha, Pelabuhan seluas 30 ha, dan rel kereta api seluas 17 ha. Jika dilihat dari keselarasannya mayoritas lahan yang tidak selaras dengan pola ruang tersebar di Kecamatan Indramayu, Sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Indramayu telah dialih fungsikan menjadi lahan permukiman, seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Penggunaan lahan yang masih selaras dengan pola ruang RTRW tertinggi terdapat di Kecamatan Cikedung sebesar 7.422 ha. Wilayah ini masih didominasi oleh lahan sawah dengan padi terus menerus dan hutan jati. Adapun lahan transisi tertinggi terdapat di Kecamatan Kerangkeng sebesar 543 ha
11	Fella Melifa, Ratna Wilis. 2020. Universitas Negeri Padang.	Analisis Kesesuaian Arahan Fungsi Kawasan dan Penggunaan Lahan Eksisting Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui arahan fungsi kawasan dan penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Pesisir Selatan • Mengetahui kesesuaian kesesuaian fungsi kawasan dan penggunaan lahan eksisting terhadap RTRW di Kabupaten Pesisir Selatan dengan 	Penelitian ini menggunakan metode metode <i>overlay</i> di setiap parameter yang dijadikan acuan dalam kesesuaian fungsi kawasan dan penggunaan lahan eksisting terhadap RTRW.	Analisis konsistensi penggunaan lahan terhadap RTRW dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW yang telah disusn sebagai pedoman pelaksanaan pemanfaatn ruang. Analisis ini dilakukan dengan cara mengoverlay peta penggunaan lahan hasil digitasi dengan peta RTRW Kota Bogor. Hasil dari <i>overlay</i> tersebut adalah sebaran konsistensi pemanfaatan ruang. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah hasil analisis diketahui bahwa telah terjadi ketidak sesuaian penggunaan lahan saat ini dengan RTRW Kota Bogor. Pada fungsi kawasan, yang paling dominan adalah Kawasan Penyangga dengan luas 2715.3098 Km ² atau 44 persen dan fungsi kawasan yang paling sedikit yaitu kawasan Kawasan Lindung dengan luas 138.82 Km ² atau

			menggunakan metode overlay		2.30 persen. Dan untuk penggunaan lahan eksisting yang paling dominan adalah Hutan dengan luas 3444.22 Km ² atau 56.9 persen dan kawasan perkebunan dengan luas 1630.708 Km ² atau 26.94 persen, yang paling sedikit yaitu kawasan Hutan Bakau/Mangrove dengan luas 2.45 Km ² atau 0.04 persen. Hasil kesesuaian fungsi kawasan, penggunaan lahan dan terhadap peruntukkan RTRW menunjukkan bahwa 269329.493 Hektar memiliki fungsi kawasan dan penggunaan lahan yang telah sesuai dengan peruntukkan lahan RTRW. dan 334205.138 Hektar memiliki fungsi kawasan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan lahan RTRW
12	Restu Fadilla, Bambang Sudarson, Nurhadi Bashir. 2018. Universitas Diponegoro.	Analisis Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Penjaringan Kota Administratif Jakarta Utara Menggunakan Sistem Informasi Geografis	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan lahan di Kecamatan Penjaringan pada tahun 2013 dan 2017 menggunakan citra multitemporal dan dilakukan dengan cara digitasi on-screen • Kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW Jakarta Tahun 2011-2030 di Kecamatan Penjaringan dilakukan dengan proses overlay 	Proses yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu membuat peta penggunaan lahan Kecamatan Penjaringan pada tahun 2013 dan 2017 dengan melakukan digitasi <i>on-screen</i> berdasarkan interpretasi citra satelit SPOT 6 yang hasilnya akan dianalisis perubahan dan kesesuaiannya dengan RTRW.	Penggunaan lahan pada Kecamatan Penjaringan dengan total luas 3.658,648 ha. Penggunaan lahan pada tahun 2013 terdiri atas Kawasan Perumahan dengan luas sebesar 1.333,123 ha atau 36,44%, Kawasan Hijau Budidaya dengan luas sebesar 924,558 ha atau 25,27%, Kawasan Industri dan Perdagangan dengan luas sebesar 490,366 ha atau 13,40%, Kawasan Perkantoran, Perdagangan dan Jasa dengan luas sebesar 414,385 ha atau 11,33%, Kawasan Ruang Terbuka Biru dengan luas sebesar 249,538 ha atau 6,82%, Kawasan Hijau Lindung dengan luas sebesar 212,423 ha atau 5,80% dan Kawasan Perkantoran, Perdagangan dan Jasa Taman dengan luas sebesar 34,255 ha atau 0,94%. Sementara Penggunaan lahan pada tahun 2017 terdiri atas Kawasan Perumahan dengan luas sebesar 1.319,097 ha atau 36,05%, Kawasan Hijau Budidaya dengan luas sebesar 865,844 ha atau 23,67%, Kawasan Industri dan Perdagangan dengan luas sebesar 509,040 ha atau 13,91%, Kawasan Perkantoran, Perdagangan dan Jasa dengan luas sebesar 455,288 ha atau 12,44%, Kawasan Ruang Terbuka Biru dengan luas sebesar

Qistin Taniyah Nur, 2024

EVALUASI KESESUAIAN LAHAN PERUMAHAN BEKAS TAMBAK DENGAN KEBIJAKAN RDTR PERKOTAAN INDRAMAYU MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

			<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Penjaringan dari tahun 2013 ke 2017 terhadap kesesuaian dengan RTRW Jakarta Tahun 2011-2030 dapat dilihat dari hasil analisis overlay. 	<p>264,780 ha atau 7,24%, Kawasan Hijau Lindung dengan luas sebesar 210,344 ha atau 5,75% dan Kawasan Perkantoran, Perdagangan dan Jasa Taman dengan luas sebesar 34,255 ha atau 0,94%.</p> <p>Kesesuaian penggunaan lahan tahun 2013 terhadap Rencana Tata Ruang/Wilayah (RTRW) Jakarta tahun 2030 adalah sebesar 2.848,019 ha atau 77,84% dari total luas Kecamatan Penjaringan, sedangkan kesesuaian lahan tahun 2017 terhadap RTRW Jakarta Tahun 2011-2030 adalah sebesar 2.890,246 ha atau 79,00% dari total luas Kecamatan Penjaringan</p> <p>Perubahan penggunaan lahan yang didapatkan berupa peningkatan dan penurunan luas penggunaan lahan. Luas lahan yang bertambah yaitu Kawasan Industri dan Pergudangan sebesar 18,674 ha (3,81%), Kawasan Perkantoran, Perdagangan dan Jasa sebesar 40,903 ha (9,87%) dan Kawasan Ruang Terbuka Biru sebesar 15,242 ha (6,11%), sedangkan luas lahan yang berkurang yaitu Kawasan Perumahan sebesar 14,026 ha (1,05%), Kawasan Hijau Budidaya sebesar 58,714 ha (6,35%) dan Kawasan Hijau Lindung sebesar 2,079 ha (0,97%). Sementara itu, untuk kesesuaian perubahan penggunaan lahan dari tahun 2013 ke tahun 2017 terhadap RTRW Jakarta Tahun 2011-2030, terdapat kawasan yang perkembangannya menyesuaikan RTRW Jakarta Tahun 2011-2030 yaitu Kawasan Industri dan Pergudangan di sebesar 21,292 ha, Kawasan Ruang Terbuka Biru sebesar 11,830 ha, Kawasan Hijau Budidaya sebesar 10,416 ha, Kawasan Perkantoran, Perdagangan dan Jasa sebesar 8,851 ha, Kawasan Perumahan sebesar 4,926 ha dan Kawasan Hijau Lindung sebesar 0,013 ha. Sementara itu, dalam kurun waktu 4 tahun, kesesuaian perubahan penggunaan lahan dari tahun 2013 ke tahun 2017</p>
--	--	--	--	--

					terhadap RTRW Jakarta Tahun 2011-2030 mengalami peningkatan sebesar 1,16%.
--	--	--	--	--	--

Qistin Taniyah Nur, 2024

EVALUASI KESESUAIAN LAHAN PERUMAHAN BEKAS TAMBAK DENGAN KEBIJAKAN RDTR PERKOTAAN INDRAMAYU MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu